

**PENGARUH KOMPETISI POLITIK DAN KEKUATAN POLITIK  
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2021)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi  
(SE) Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**FADILA SRI MULYATI**  
**2018/18043015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KOMPETISI POLITIK DAN KEKUATAN POLITIK  
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

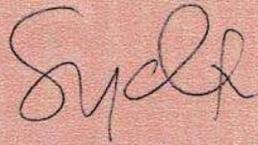
*(Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2021)*

Nama : Fadila Sri Mulyati  
Nim / TM : 18043015 / 2018  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2023

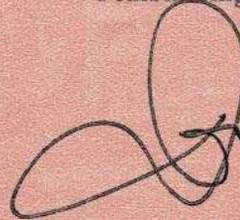
Disetujui Oleh:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE., M.Si., Ak  
NIP. 19690610 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji oleh Tim Penguji Skripsi

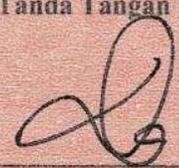
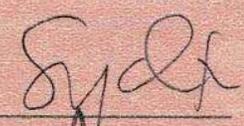
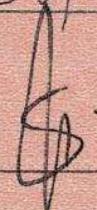
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Kompetisi Politik dan Kekuatan Politik Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2021)  
**Nama** : Fadila Sri Mulyati  
**NIM /TM** : 18043015 / 2018  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Juni 2023

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Anggota	Sany Dwita, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D	2. 
3.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadila Sri Mulyati  
NIM/TM : 2018/ 18043015  
Tempat/Tgl. Lahir : Barulak/ 22 Juni 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jorong Koto Nan Tuo, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru,  
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat  
No. HP/Telp : 082289240409  
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetisi Politik Dan Kekuatan Politik Terhadap  
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (*Studi Empiris Pada  
Pemerintahan Daerah di Pulau Sumatra Tahun 2021*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juni 2023  
Yang menyatakan,



Fadila Sri Mulyati  
NIM.18043015

## **ABSTRAK**

**Fadila Sri Mulyati, 2023** “Pengaruh Kompetisi dan Kekuatan Politik Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2021)

**Pembimbing Dr. Deviani, SE., M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik dan kekuatan politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis data menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 154 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dengan jumlah sampel sebanyak 125 sampel selama satu tahun pengamatan (2021). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini adalah kekuatan politik berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota Pulau Sumatera tahun 2021. Namun variabel kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota Pulau Sumatera tahun 2021.

**Kata Kunci :** **Faktor Politik, Transparansi, Kompetisi Politik, Kekuatan Politik**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, penulis panjatkan puji syukur penulis atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul” Pengaruh Kompetisi Politik dan Kekuatan Politik Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada pemerintahan daerah di Pulau Sumatera tahun 2021)” untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada ibu Dr. Deviani,SE,M.Si,Ak selaku dosen pembimbing atas semua arahan, masukan, saran, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D dan Ibu salma taqwa, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis dalam menempuh S1 di fakultas Ekonomi dan Bisnis

4. Bapak Dr. Erinos Nr. Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan pengarahannya dan petunjuk kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, motivasi dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Yang paling utama, ucapan terima kasih dan rasa bangga penulis ucapkan kepada Apa dan Ama tersayang. Ama yang selalu memberikan dukungan dan doa disetiap perjalanan dengan kasih sayang serta ketulusan hati yang tak pernah lelah mendengar setiap keluh kesah. Serta Apa yang memberikan pelajaran dan kekokohan prinsip yang tegas dan mandiri dalam menjalankan kehidupan. Berkat doa Apa dan Amalah sehingga semua langkah penulis dapat dijalani dengan baik. Semoga segala doa baik yang Apa dan Ama panjatkan dapat mengantarkan penulis pada kesuksesan yang sebagaimana diharapkan oleh Apa dan Ama.
7. Terimakasih atas doa dan nasehatnya aba dan umi. Aba yang selalu berharap agar cucunya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sehat selalu dan panjang umur aba dan umi agar bisa merasakan kesuksesan kita suatu saat, Aamiin.
8. Teruntuk saudara saya tercinta, Kak Yola dan Ulan terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini.

9. Asri Budiman, seseorang yang telah menjadi teman, sahabat dan kekasih terima kasih telah mau berjuang bersama-sama serta mendukung hal baik yang penulis lakukan. Semoga suatu saat kita bisa mewujudkan cita-cita yang telah diimpikan selama ini, aamiin.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018, terkhususnya kelas A yang telah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sekarang, penulis merasa beruntung sekali bisa bertemu dan berda diantara orang-orang hebat dan luar biasa seperti kalian
11. Ajii, Piak Vira, Febby, Atik, Donna, Yanah dan Icis (Grup Banner), terima kasih menjadi sahabat yang baik semasa kuliah yang memberikan semangat dan dukungan. Mudah-mudahan kita sukses bersama.
12. Tidak lupa juga untuk teman skripsian, teman bertanya, teman memberi nasehat dan semangat di akhir masa sulit skripsian yaitu Kak Ica, Kak Kiki dan Nufus. Semoga setelah ini kita bertemu lagi dalam versi terbaik kita masing-masing.
13. Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperbimbingan (Mahasiswa Bu Deviani) terimakasih telah kompak, telah berbagi informasi sehingga memudahkan dalam skripsian ini. Sukses selalu untuk teman-teman ku.
14. Terimakasih teristimewah untuk Ya, La, Dindin (Versi nama ku) yang telah berjuang dan aku berharap agar kalian bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi jalan hidup ini.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Padang, Juni 2023

Fadila Sri Mulyati  
18043015

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Kajian Pustaka.....	18
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	18
2. Konsep Akuntabilitas .....	20
3. Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuangan.....	23
4. Transparansi Pengelolaan Keuangan .....	27
5. Kompetisi Politik.....	29
6. Kekuatan Politik .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Pengembangan Hipotesis .....	43
D. Kerangka Konseptual .....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	49
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber Data .....	49
C. Populasi dan Sampel.....	50
D. Metode Pengumpulan Data .....	51
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	52
F. Teknik Analisis Data .....	61

1. Statistik Deskriptif .....	61.
2. Uji Asumsi Klasik .....	61
a. Uji Normalitas .....	61
b. Uji Heteroskedastisitas.....	62
c. Uji Multikolinearitas .....	62
3. Analisis Regresi Berganda .....	63
4. Uji Hipotesis .....	63
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	64
b. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F) .....	64
c. Uji Parsial ( Uji Statistik t ).....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	66
B. Hasil Penelitian .....	67
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	67
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	67
3. Hasil Penelitian .....	80
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	80
2. Uji Asumsi Klasik .....	82
a. Uji Normalitas .....	82
b. Uji Multikolinearitas .....	83
c. Uji Heteroskedastisitas .....	84
3 Uji Regresi Berganda .....	85
4 Uji Model .....	87
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	87
b. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F) .....	88
c. Uji Parsial ( Uji Statistik t ).....	89
C. PEMBAHASAN .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Keterbatasan Penelitian .....	97
C. Saran .....	98

DAFTAR PUSTAKA ..... 100

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian .....	51
Tabel 2. Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	53
Tabel 3. Tingkat Kategori Transparansi.....	57
Tabel 4. Operasional dan Pengukuran Variabel.....	59
Tabel 5. Data Transparansi .....	68
Tabel 6. Data Kompetisi Politik.....	72
Tabel 7. Data Kekuatan Politik .....	77
Tabel 8. Uji Statistik Deskriptif .....	81
Tabel 9. Uji Normalitas.....	83
Tabel 10. Uji Multikolonieritas.....	84
Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas.....	86
Tabel 12. Uji Regresi Linear Berganda.....	86
Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	88
Tabel 14. Pengujian F .....	89

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Penelitian .....	106
Lampiran 2. Rincian Indikator Pengukuran Transparansi .....	111
Lampiran 3. Indikator Penetapan Ketepatan Waktu Pengungkapan.....	112
Lampiran 4. Observasi Website Kabupaten dan Kota .....	113
Lampiran 5. Nilai Variabel Transparansi (Y) .....	238
Lampiran 6. Kompetisi Politik (X1) .....	242
Lampiran 7. Perhitungan Variabel Kekuatan Politik (X2).....	246
Lampiran 8. Hasil Olah Data Statistik SPSS .....	255

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi (*supply side of transparency*), dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*demand side of transparency*) (Araujo & Tejedo-Romero 2016). Hal ini didasarkan pada ketersediaan informasi organisasi pemerintah yang memungkinkan warga negara dan aktor eksternal lainnya untuk memantau dan menilai kinerja internal dan kinerja organisasi publik (Meijer, 2013; Grimmelikhuisen 2012). Transparansi adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi dan manajerial (Hirsch & Osborne, 2000). Silver (2005) kemudian diikuti Ridha & Basuki (2012) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasinya. Transparansi mengacu pada akses yang tidak terbatas oleh masyarakat untuk informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan pada keputusan dan kinerja di sektor publik (Armstrong 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi adalah prinsip terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk mengetahui informasi pengelolaan sumber daya secara terbuka dan menyeluruh sebagai pertanggungjawaban pemerintah. Dibentuk

peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan secara terbuka dari pemerintah dan mengurangi konflik antara pihak yang berkepentingan sehingga informasi yang diperoleh oleh masyarakat dapat digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan.

Dalam konteks pemerintah daerah (pemda), Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo 2004). Lebih lanjut, transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektifitas, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Gerakan transparansi telah didorong oleh TIK (Ding, 2009; Garrido Rodriquez et al. 2019; Araujo & Tejedro Romero, 2020), situs web pemerintah (Brandsma et al., 2008) dan perubahan peraturan (Araujo & Tejedro Romero, 2016); Pina & Avekkaneda, 2019). Bersama-sama komponen tersebut meningkatkan akses ke informasi dengan berfokus pada dua isi utama: a) hak atas warga negara dan masyarakat untuk mengakses informasi layanan publik (Gesuele et al. 2018), dan b) tanggung jawab pemerintah untuk secara aktif

mempublikasikan informasi tentang pengambilan keputusan kebijakan dan semua informasi kepentingan publik (Bauhr & Grimes, 2014).

Praktek transparansi tersebut dibingkai dalam dua jenis transparansi pemerintah yaitu reaktif dan proaktif. Transparansi reaktif berkaitan dengan permintaan informasi oleh warga (Brandsma et al. 2008). Menurut Michener & Bersch (2013) transparansi reaktif disebut juga dengan transparansi pasif yang berkaitan dengan peraturan atau undang-undang kebebasan informasi. Pada sisi lain, transparansi proaktif merupakan varian *e-government* terbaru melalui informasi aktif di situs web (Garrido Rodriguez et al. 2019). Trasparansi melalui situs web menciptakan informasi yang tersedia untuk semua warga negara secara sukarela atau wajib, tanpa ada permintaan yang diajukan (Ingram, 2017; Michener & Bersch, 2013).

Transparansi keuangan di Indonesia pertama kali disebutkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa salah satu upaya khusus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang (UU) N0. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 7 dijelaskan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Permohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Dalam UU tersebut, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi

pengelolaan keuangan tertera pada Pasal 9 ayat 2 poin b yang berbunyi “informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik” dan poin c, “informasi mengenai laporan keuangan”.

Transparansi dalam konteks pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Pemerintah daerah (Pemda) diinstruksikan untuk membuat konten atau portal Transparansi Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (TPAD) pada *website* pemerintah daerah yang berisi berbagai dokumen terkait anggaran dan laporan keuangan.

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan transparansi semakin gencar, hal ini dapat diketahui dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga serta pemda untuk mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada poin 32 lampiran Inpres No. 7 Tahun 2015 menggalakan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, gubernur, bupati, walikota agar meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah dengan cara menyediakan informasi pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel berupa 12 item informasi pada masing-masing *website* resmi pemda. Hal tersebut sangat penting karena pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara serta elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah). Menurut Syamsul (2020) kebijakan Inpres No. 7 Tahun 2015 poin 32

dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi mereka.

Transparansi memiliki dampak positif dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Berdasarkan penelitian Albalade (2013) menyatakan transparansi menjadi alat yang diperlukan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Kurangnya transparansi sering dikaitkan dengan korupsi pemerintah. Sharman & Chaikin (2009) menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah keuangan yang paling penting di sebagian besar negara berkembang, dan mungkin merupakan hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi. Menurut Matheson & Kwon (2003) dan Guillamon et al (2011) kepatuhan yang tidak memadai terhadap peraturan akuntansi dan pelaporan memiliki hubungan positif dengan resiko korupsi. Hood (2001); Fozzard & Foster (2001) menjelaskan bahwa transparansi pemerintah merupakan isu penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Tanzi (1998) berpendapat bahwa kurangnya transparansi menciptakan lahan subur untuk korupsi.

Sesuai dengan teori keagenan yaitu terdapat asimetri informasi dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara (Eisenhardt, 1889; Lane, 2005; Zimmerman, 1997). Karena pejabat terpilih tidak memiliki kepentingan yang sama dengan warga negara untuk itu pemerintah harus dituntut bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya (Lane, 2005). Selain itu warga harus memiliki akses ke informasi yang memungkinkan mereka untuk memantau dan menilai tindakan pejabat terpilih, sehingga pejabat terpilih akan bertindak sesuai tanggung jawabnya (Laswad, 2005). Transparansi yang di dukung *e-government* telah

menjadi cara untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan derajat kepercayaan publik terhadap aktor politik, sehingga meningkatkan reputasi kota (Tejedo-Romero & Araujo, 2020; Fug, 2013).

Nurhadianto & Khamisah (2019) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindakan pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pada prinsipnya transparansi informasi keuangan adalah salah satu parameter utama yang difokuskan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi agar dapat mencapai pemerintah yang baik (*good governance*). Namun demikian, masih terdapat pemerintah daerah melakukan tindakan korupsi.

Hasil penelitian *Transparency International Indonesia* (TII) tentang indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan bahwa Tahun 2021 IPK Indonesia berada di titik 38 dan ranking 96 dari 180 negara, artinya negara Indonesia masih memiliki skor di bawah 50 yang mengindikasikan negara tersebut memiliki korupsi serius. Beberapa negara yang punya skor dan ranking yang sama dengan Indonesia adalah Argentina, Brazil, Turki, Serbia dan Lesotho (Tempo. co, 25 Januari 2022). Sementara itu, melalui hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021), terdapat 179 kasus korupsi di tingkat kabupaten/kota Indonesia (ICW, 2022).

Berdasarkan data diatas masih terdapat pemerintah daerah melakukan tindakan korupsi seperti di Sumatra yang pejabatnya menjadi langganan kasus korupsi. Dikutip dari databoks. katadata.co.id (07 Maret 2022) menurut laporan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2021 kasus tindak pidana korupsi di Pulau Sumatera terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan kasus 30 kasus, Sumatra Utara 5 kasus, Riau & Kepulauan Riau 4 kasus. Temuan tersebut, juga mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah di Pulau Sumatra masih rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ritonga & Syamsul (2016) yang mengungkapkan bahwa Pulau Sumatra untuk aspek perencanaan memiliki skor 14%, aspek pelaksanaan 13,33% dan aspek pelaporan & pertanggungjawaban 13,5%. Penelitian Nurhadianto & Khamisah (2019) menemukan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 di kabupaten/kota provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit atau tidak cukup transparan.

Penelitian Suwarsih & Ritonga (2017) menemukan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan. Agustin & Arza (2020) melakukan penelitian transparansi pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat menemukan hasil bahwa masih rendahnya jumlah pemerintah kabupaten/kota yang secara konsisten melakukan transparansi

Jessica & Suhartono (2020) menemukan indeks transparansi pada Kab/Kota di Pulau Sumatra tahun anggaran 2018 sebesar 10,2%. Anisa (2021) di Pulau

Sumatra dengan berfokus kepada tiga tahapan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2019 menemukan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 15,2%. Penelitian Sandunaez & Syafei (2022) menghitung indeks transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di provinsi Jambi menunjukkan angka 37,50% dan 12,50% untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 yang kemudian jika indeks tersebut diperingkatkan dan dikategorikan maka masuk dalam tingkat keterbukaan anggaran tidak cukup transparan.

Fenomena dan data di atas mengindikasikan bahwa tingkat transparansi Pulau Sumatra masih rendah sehingga menjadi isu yang cukup penting untuk diperbaiki, mengingat adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 mengenai media *website* yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi secara transparansi. Kemudian di pertegas dengan Inpres nomor 7 Tahun 2015 yang diterbitkan pada enam tahun yang lalu tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti transparansi pemerintah daerah melalui *website* pemda, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan pemerintah daerah telah menjadi fokus dalam beberapa penelitian terdahulu baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan Garcia dan Carcia (2010) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan

informasi keuangan di website Spanyol. Hasil penelitian Garcia dan Garcia (2010) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi adalah ukuran pemda, *capital investment*, *press visibility*, dan kompetisi politik. Penelitian Guillamon et al. (2011) di Spanyol mengidentifikasi faktor politik dan ekonomi terkait dengan transparansi dalam jangka panjang, selain itu analisis evaluasinya mengamati bahwa publikasi informasi menjadi salah satu rangsangan terbesar bagi pemerintah kota untuk meningkatkan tingkat informasi publik mereka. Penelitian Tejedo Romero & de Araujo (2015) menyimpulkan variasi tingkat transparansi terkait dengan faktor politik. Penelitian Araujo & Tejedo Romero (2016) menemukan kompetisi politik berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pemerintah daerah. Penelitian Benito et al. (2021) menemukan kekuatan politik berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan pada website resmi dilakukan oleh Puspita (2010) menemukan bahwa PAD, DAK, DAU, dan Ukuran Pemda mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi di website pemda. Martani et al (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan signifikan pada website resmi pemda. Penelitian Rahim & Martani (2016) menggunakan tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik pemda (usia daerah, kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah, jenis daerah, ukuran daerah), karakteristik demografi (tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan daerah). Hasil penelitian Rahim & Martani

(2016) menunjukkan bahwa variabel tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, serta kesejahteraan daerah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dan tidak ditemukan pengaruh variabel usia pemda, kemandirian daerah, pengangguran dan kompetisi politik terhadap transparansi keuangan daerah. Jessica & Suhartono (2020) di Pulau Sumatra menemukan hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia dan Opini Audit, Opini Audit dan Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap transparansi.

Literatur diatas telah menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi transparansi. Faktor yang paling dominan dalam menentukan transparansi adalah faktor politik. Namun literatur mengenai pengaruh faktor politik terhadap transparansi di Indonesia dengan konteks pemerintah daerah saat ini masih jarang. Untuk itu penelitian ini dilakukan kembali dengan populasi penelitian yang berbeda yaitu pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatra. Selain itu keterbatasan dari penelitian terdahulu berada di kategori pengukuran transparansinya. Sejumlah literatur, seperti Garcia dan Garcia (2010); Guillamon et al. (2011); Tejado Romero & de Araujo (2015); Benito et al. (2021) mengukur transparansi berdasarkan ketersediaan item informasi saja tanpa melihat aksesibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan. Aksesibilitas berarti menunjukkan data dan informasi yang tersedia dalam website pemda dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat, sedangkan ketepatan waktu adalah rentang waktu yang ditetapkan (Huwae, 2016). Padahal, esensi sebenarnya atau sejatinya dari sebuah informasi terletak pada ketepatan waktu pengungkapan (publikasi). Armstrong (2005); Chalid Pheni (2005); dan Fung (2014) menyatakan bahwa

ketepatan waktu adalah salah satu pilar utama dari transparansi. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan tepat waktu, tentunya akan memiliki nilai sempurna, lebih bermanfaat, dan lebih berpengaruh bagi pengambil keputusan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan pengembangan atribut riset yang lebih baik dalam hal literatur serta data, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan maupun penguat referensi terkait pengaruh faktor politik terhadap transparansi pada pemerintah daerah

Dalam penelitian yang dilakukan Adiputra (2018); Tejedo & de Araujo (2015) menjelaskan bahwa faktor politik merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah. Faktor politik adalah kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi, yang dimana dalam hal ini faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam struktur pemerintahan yang nantinya dapat memudahkan dan menyulitkan transparansi pelaporan keuangan daerah (Fardian ,2014; Di Maggio & Powell, 1983).

Pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai literatur transparansi menunjukkan bahwa tekanan untuk menjadi lebih transparansi bagi pemerintah daerah diakibatkan oleh persaingan politik terkait dengan pengawasan kegiatan partai. Berliner & Erlich (2015) menyatakan kompetisi politik dianggap berperan penting dalam mengadopsi reformasi institusi dengan melakukan peningkatan akses informasi. Menurut Barardi (2015) kompetisi politik merupakan suatu proses kompleks dalam demokrasi dimana adanya persaingan politik untuk

mendapatkan kekuasaan politik berupa hak membentuk dan mengontrol arah kebijakan publik.

Persentase kemenangan yang tinggi dalam kompetisi politik menunjukkan bahwa calon terpilih telah memenuhi keinginan masyarakat yang lebih besar dari calon lainnya. Artinya calon terpilih tersebut tidak mengalami kompetisi politik yang tinggi atau ketat. Sebaliknya apabila persentase kemenangan yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan lawan lainnya, maka kompetisi antara calon terpilih lebih tinggi atau ketat karena keinginan masyarakat terhadap masing-masing calon tidak terlalu berbeda maka menyebabkan kompetisi politik menjadi lebih tinggi.

Pemerintah daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat, lawan kepala daerah saat pemilukada dan partai politik yang tidak menggusung kepala daerah sehingga semakin sedikit ruang untuk pemerintah dalam menyembunyikan kegiatan pemerintahan. Hal ini akan menjadi pendorong adanya keterbukaan informasi yang besar juga (Navarro-Galera et al, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Garcia-Garcia, 2010; Araujo & Tejedro- Romero, 2016; Tavares & de Cruz, 2020) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kompetisi politik dengan transparansi pemerintah daerah. Sebagian besar dapat dijelaskan oleh tekanan dari kelompok oposisi yang memaksa kepala daerah untuk mengungkapkan informasi tertentu. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Wau & Ratmono, 2015; Rahim & Martani, 2016; Tejedro-Romero & Araujo, 2020) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetisi politik dengan transparansi pemerintah.

Penelitian Tejedo & de Araujo (2015) dan Benito et al. (2021) menjelaskan kekuatan politik berpengaruh terhadap pengungkapan informasi. Kekuatan politik yang dimiliki oleh pemimpin dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan praktik pengungkapan informasi, kekuatan yang berbeda biasanya juga mengusulkan bentuk kepemimpinan yang berbeda (Alt et al. 2006). Kekuatan politik yang dimiliki oleh seorang pemimpin daerah tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila di Indonesia memiliki dua peranan penting yakni sebagai pandangan hidup, atau sebagai pedoman hidup, atau sebagai pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan sistem partai politik di Eropa yang terbagi menjadi kubu partai sayap kanan (partai rakyat/konservatif) dan kubu partai sayap kiri (partai sosialis/progresif), sistem partai yang digunakan di Indonesia adalah sistem multipartai. Sistem multipartai yang dianut di Indonesia menyebabkan tidak adanya pembagian partai sayap kiri dan partai sayap kanan seperti yang terjadi dalam bangsa Spanyol. Pada sistem partai sayap kiri, pemerintahannya dianggap sebagai “partai gerakan” dan “partai keteraturan”. Sehingga politik sayap kiri merupakan spektrum politik yang mendukung kesetaraan sosial dan seringkali berlawanan dengan sistem hierarki sosial sayap kanan. Sistem multipartai ini menyebabkan tidak adanya partai yang mempunyai suara mayoritas di Indonesia sehingga partai tersebut membentuk suatu koalisi dan oposisi.

Koalisi merupakan bentuk kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Sedangkan oposisi adalah partai

penentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan yang berkuasa. Penggabungan partai politik tersebut biasanya atas dasar tujuan politik dan pandangan politik yang sama sehingga dalam pengusulan calon kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjadi peserta pemilihan ketika calon kepala daerah tersebut mendaftarkan diri dan memenuhi pengajuan dirinya sebagai calon independen dalam pemilihan kepala daerah atau diusulkan oleh satu partai, atau diusulkan oleh beberapa gabungan partai politik sehingga 2 sampai 3 partai dapat mendukung satu calon yang sama.

Koalisi tersebut dirasakan tidak hanya di level pemerintah pusat, melainkan sampai ke tiap-tiap daerah di Indonesia. Dengan adanya kesamaan kekuatan politik dalam berkoalisi mendukung pemerintahan yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mengindikasikan keselarasan sistem nilai yang ada antara partai yang tergabung dalam koalisi dengan pemerintah yang berkuasa. Kondisi tersebut diduga dapat menurunkan usaha komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi secara lebih transparan kepada masyarakat karena legitimasi akan terjaga dengan adanya kesamaan keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai yang telah terwujud dan dipahami bersama.

Penelitian Tejedo & de Araujo (2015) juga menjelaskan bahwa kekuatan mayoritas berdampak kepada penurunan transparansi. Kotamadya yang dipimpin oleh kekuatan mayoritas berada dalam posisi nyaman dan tidak rentang untuk mengungkapkan informasi (Albalate, 2013). Posisi mayoritas berdampak kepada pemerintah dalam memutuskan kapan dan informasi mana yang akan diungkapkan sehingga tidak memerlukan dukungannya dari pihak lain (Tejedo & de

Araujo 2015). Berbeda dengan walikota yang memiliki kekuatan fragmentasi yang menghadapi lebih banyak situasi keterampilan negosiasi dan kemampuan untuk berkompromi diperlukan untuk menyekinkan anggota politik lain dalam mendukung kebijakan yang diusulkan oleh walikota (Tevarés & da Cruz, 2020).

Namun demikian, Benito et al, (2021) menemukan kekuatan politik mayoritas berpengaruh positif terhadap transparansi, bahwa semakin tinggi kekuatan politik tingkat transparansi juga semakin tinggi meskipun petahana berada di partai mayoritas akan tetap mengungkapkan lebih lengkap informasi mengenai kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dan pihak oposisi. Garcia Sanchez *et al* (2013) dan Tejedo Romero & Araujo (2020) tidak menemukan bahwa kekuatan politik berpengaruh terhadap transparansi. Ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan daerah pada website pemda semakin menambah perdebatan diantara praktisi, sehingga penelitian mengenai transparansi keuangan daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Tejedo-Romero & Araujo (2015) dan Araujo & Tejedo Romero (2016) menggunakan dua variabel independen yaitu kompetisi politik (Araujo & Tejedo Romero, 2016) dan kekuatan politik (Tejedo-Romero & Araujo, 2015). Variabel kompetisi politik dan kekuatan politik dipilih dengan alasan masih terdapat perbedaan temuan dari penelitian sebelumnya. Selain itu literatur mengenai pengaruh faktor politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih sedikit dan memiliki berbagai keterbatasan dalam pengambilan data serta acuan literatur yang kurang

memadai. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan pengembangan atribut riset yang lebih baik dalam hal literatur serta data, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan maupun penguatan referensi terkait pengaruh faktor politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada indikator penelitian. Penelitian sebelumnya menilai ketersediaan transparansi kotamadya Portugis melalui website Transparency International Spain dengan indikator variabel biner nilai 1 jika informasi tersedia dan 0 sebaliknya. Sedangkan penelitian sekarang menilai indeks transparansi melalui tiga kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan berdasarkan Inpres No 7 Tahun 2015 berupa 12 indikator transparansi untuk tahun anggaran 2021 melalui website pemerintah Kabupaten/Kota Pulau Sumatra.

*Fenomena Gap* dan *Research Gap* diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul” **Pengaruh Kompetisi Politik dan Kekuatan politik terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan daerah di Pulau Sumatra Tahun 2021”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Apakah kekuatan politik mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris pengaruh positif faktor kompetisi politik serta pengaruh negatif kekuatan politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi sekto publik dengan menghubungkan kompetisi politik dan kekuatan politik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

#### **b) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu bagi peneliti, masyarakat maupun instansi yang terkait.

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah pada *website* resmi pemerintahan daerah di Sumatera
2. Bagi masyarakat, sebagai bahan rujukan dalam mengevaluasi transparansi pemerintah daerah di Sumatera melalui *website*.
3. Bagi pemerintah daerah, sebagai acuan dalam rangka meningkatkan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat.